

BPK Soroti Pembelian Hotel Mutiara

YOGYA (KR) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti langkah Pemda DIY yang membeli Hotel Mutiara. Pembelian yang dilakukan tahun lalu tersebut menghabiskan anggaran Rp 170 miliar.

Selain itu, sorotan juga diberikan perihal pembangunan tanggul di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan. Sorotan dan rekomendasi tersebut disampaikan Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan DIY tahun anggaran 2020 pada DPRD dan Gubernur DIY di Gedung DPRD DIY, Kamis (22/4).

Agus menjelaskan, berdasarkan temuan BPK pada penganggaran dan pengadaan lahan

Hotel Mutiara 1-2 Oktober 2020 dianggap belum memadai. Sedangkan pembangunan TPST Piyungan perencanaan juga belum memadai.

"BPK meminta Pemda DIY segera menyusun rencana pemanfaatan Hotel Mutiara. Termasuk penganggarannya yang bersumber dari dana keistimewaan tersebut. Sedangkan untuk TPST Piyungan, kami merekomendasikan Pemda DIY segera menyusun kajian teknis atas proyek pengolahan limbah lindi," jelasnya.

Selain dua hal itu, BPK juga

menyoroti rencana strategis pembangunan kawasan pariwisata DIY. Sesuai RPJMD 2017-2022, DIY menargetkan menjadi kawasan wisata ternama di Asia Tenggara. "Hanya saja rencana detail induk pengembangannya belum dibuat secara spesifik. termasuk koordinasi dengan kabupaten lain, seperti Sleman dan Gunungkidul," ujarnya.

Hingga semester kedua 2020, BPK memberikan 1.084 rekomendasi kepada DIY. Dari jumlah tersebut 81.87 persen atau 858 sudah ditindaklanjuti. Angka tersebut lebih tinggi dibanding angka nasional yang rata-rata 63 persen.

Gubernur DIY Sri Sultan HB X mengakui ada kelemahan sistem pengendalian internal dari

yang direkomendasikan BPK. Meski demikian, rekomendasi tersebut akan segera ditindaklanjuti.

"Temuan akan segera kami tindaklanjuti dan menjadi bahan evaluasi perbaikan sistem keuangan daerah," katanya.

Sementara itu Ketua DPRD DIY Nuryadi menyatakan, jika DPRD tidak pernah dilibatkan dalam pembelian Hotel Mutiara. Meskipun menggunakan dana istimewa, secara etika Pemda DIY tetap harus berkomunikasi dengan DPRD.

"Kalau komisi tidak tahu. Jika sampai komisi juga tidak diajak bicara, ini petaka bagi kita. Sampai 11 kali WTP tapi kok rekomendasikan banyak banget. Saya kira ada sesuatu," ungkapnya. (Awh/Bro)-f

ACE Yogya Donasikan 320 APD



KR-Istimewa

Penyerahan donasi APD dari ACE Yogya ke personel BPBD.

YOGYA (KR) - ACE Hardware Yogya kembali mendonasikan alat pelindung diri (APD) bagi tim penanggulangan Covid-19 di Kota Yogya dan sekitarnya. Kali ini mencapai 320 APD yang secara simbolis sebelumnya sudah diterima Walikota Yogya Haryadi Suyuti pada Senin (19/4) lalu.

Store Manager ACE Urip Yogyakarta menjadi penanggung jawab di Yogya, Nurjaman, mengaku 320 APD itu terdiri dari 200 pakaian hazmat yang diterima walikota, dan 50 pakaian masing-masing diserahkan ke Puskesmas Depok dan Puskesmas Danurejan II. Sisanya yakni 20 hazmat diserahkan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Yogya. "Sebelumnya di tahun 2020 kami juga membantu masker, alat kesehatan, thermogun serta kebutuhan penanggulangan Covid-19 yang diterima melalui kantor Gubernur DIY, Walikota Yogya dan RS Sardjito serta beberapa panti asuhan dan panti jompo," urainya, Rabu (21/4).

Senada disampaikan Area Manager ACE Jateng-DIY, Aries Haryo. Menurutnya, sudah selayaknya ACE di DIY turut memberikan dampak baik bagi sekitar. Apalagi keberadaan mereka disambut baik masyarakat melalui gerai di ACE Ambarukmo Plaza, ACE Hartono Mall, ACE Sleman City Hall dan ACE Urip Sumoharjo.

Aries menambahkan, rangkaian kegiatan ini merupakan program nasional. Saat ini penerima manfaat diperluas ke 50 kota di 26 provinsi paling terdampak Covid-19. Donasi dilakukan dengan target puskesmas, rumah sakit, dinas sosial, petugas pemakaman, dan pemerintah kota melalui Kawan Lama Foundation, yaitu yayasan yang menaungi kegiatan sosial. (Dhi)-f

PEMBARUAN DATA PERKAWINAN

Dindukcapil Buka Kesempatan Perubahan KK

YOGYA (KR) - Hasil pendataan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Kota Yogya, terdapat 23 persen dari perkawinan yang ada, statusnya di Kartu Keluarga (KK) masih kawin tidak tercatat. Oleh karena itu layanan perubahan KK kini mulai dibuka untuk periode 21 April hingga 31 Mei 2021 melalui aplikasi Jogja Smart Service (JSS).

"Periode waktu itu kami berikan untuk masyarakat agar menyampaikan bukti nikahnya yakni buku atau akta perkawinan. Setelah itu akan kami verifikasi keabsahannya. Jika sesuai, kami update. Kemudian jika ada perubahan, KK yang baru lang-

sung kami sampaikan," urai Kepala Dindukcapil Kota Yogya Dra Ch Lucy Irawati, Kamis (22/4).

Lucy mengatakan, awalnya pihaknya hendak menyiapkan formulir berupa *google form* untuk pendataan selama masa pandemi. Akan tetapi hal itu urung dilakukan dan kini dialihkan melalui aplikasi JSS karena sudah familiar di masyarakat Kota Yogya. Bagi yang tidak memiliki akun JSS, bisa melalui kader di tiap kelurahan. "Lewat JSS itu datanya jadi satu sehingga lebih mudah dan aman. Jadi tinggal buka menu JSS pilih konten Updating Data Perkawinan kemudian mengisi data diri.

Selanjutnya unggah foto KK dan buku nikah asli kemudian kirim. Setelah terverifikasi, KK baru akan kami sampaikan," paparnya.

Pembaruan data perkawinan yang merujuk di KK ini dinilai cukup penting dilakukan. Pasalnya, dalam regulasi yang baru status perkawinan yang memiliki bukti nikah berupa akta atau buku perkawinan ialah harus kawin tercatat. Sedangkan dalam KK yang lama banyak status masih kawin belum tercatat.

Oleh karena itu, Dindukcapil Kota Yogya menganalisis data melalui KK yang statusnya kawin tidak tercatat. Data itu selanjutnya disampaikan ke perangkat

RT agar diteruskan ke warga yang bersangkutan. Harapannya, warga yang memiliki bukti pernikahan berupa akta atau buku perkawinan namun data KK masih kawin tidak tercatat, bisa melakukan pembaruan. "Jika semua sesuai dan KK ada perubahan, kami akan layani pembaruan KK dan menyampaikan ke warga," jelas Lucy.

Pembaruan data perkawinan cukup penting karena akan mengikat banyak hal. Di antaranya dalam akta kelahiran anak hingga urusan bagi waris atau turun waris. Sehingga pembaruan perlu dilakukan sejak dini guna mengantisipasi persoalan yang timbul di kemudian hari. (Dhi)-f

PEMBELAJARAN MUATAN KHUSUS HSPG Jadi Percontohan Nasional



KR-Devid Permana

Kegiatan identifikasi Pusat Kurikulum dan Perbukuan di HSPG.

YOGYA (KR) - HSPG (Home Schooling Prima-gama) Yogyakarta ditunjuk oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI menjadi salah satu model pendidikan non formal (home schooling) di Indonesia. Untuk mengetahui keunggulan-keunggulan yang dimiliki HSPG, Pusat Kurikulum dan Perbukuan melakukan identifikasi ke HSPG, 19-21 April 2021.

Peneliti di Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendikbud RI, Mariati Purba MPd mengatakan, di Indonesia ada 6 sekolah yang dijadikan model. HSPG ditunjuk karena memiliki keunggulan di pembelajaran muatan khusus yaitu Teknologi Informasi (TI), Bahasa Inggris, Bahasa Korea, Seni Budaya, Penjas dan keterampilan.

"Jadi di HSPG ini, siswa yang telah lulus, tidak hanya membawa pulang ijazah saja, tapi juga memiliki bekal keterampilan yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. Ini menjadi keunggulan dari HSPG," kata Mariati kepada KR disela acara bertajuk 'Identifikasi Kebutuhan Pengembangan Capaian Pembelajaran Muatan Khusus' di HSPG Yogyakarta, Senin (20/4).

Acara dihadiri perwakilan PKBM di Kota Yogyakarta, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dan tokoh masyarakat dengan memperhatikan protokol kesehatan. Menurut Mariati, setelah identifikasi, keunggulan pembelajaran muatan khusus yang dimiliki HSPG kemudi-

an akan disusun dan ditawarkan ke PKBM serupa di seluruh Indonesia untuk diadopsi. Direktur HSPG Ir Kusnanto MM menyambut baik dan mendukung upaya dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan dalam mengidentifikasi kebutuhan pengembangan capaian pembelajaran muatan khusus. Menurut Kusnanto, HSPG bersama Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta terus bersinergi dalam pengembangan muatan khusus, terutama seni dan budaya.

Sementara Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Dedi Budiono MPd mengatakan, muatan khusus tentang seni budaya terus dikembangkan di sekolah-sekolah formal di Kota Yogyakarta. (Dev)-f

GANDENG GENDONG JADI PILAR PEMBANGUNAN 42 Kelurahan di Yogya Susun Masterplan

YOGYA (KR) - Sebanyak 42 kelurahan di Kota Yogya tahun ini didorong sudah memiliki masterplan untuk capaian pembangunan. Langkah itu menyusul tiga kelurahan lain yang sudah dijadikan percontohan yakni Karangwaru, Wirogunan dan Gedongkiwo.

Wakil Walikota Yogya Heroe Poerwadi, menuturkan masterplan tersebut berbeda dengan profil kelurahan. "Jadi di samping memuat berbagai potensi, juga bisa memberikan solusi atas permasalahan di tiap kelurahan. Ada target yang terukur dari tiap persoalan pembangunan seperti kemiskinan, anak stunting dan sebagainya," urainya, Kamis (22/4).

Masterplan kelurahan itu pun menjadi fase ketiga atau terakhir untuk implementasi program Gandeng Gendong. Hal ini karena masterplan itu mengangkat tema Satu Kabar Gemilang, kepanjangan dari sasaran tunggal langkah bersama untuk menuju efisiensi anggaran dan capaian kinerja. Tujuannya agar setiap kegiatan yang ada di wilayah atau kelurahan mampu mendapatkan hasil optimal dengan anggaran efisien.

Heroe menjelaskan, Gandeng Gendong kini menjadi pilar pembangunan di Kota Yogya. Ada tiga fase yakni tahap awal berupa pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan. Sehingga pada fase awal tersebut

banyak didorong usaha kuliner di tiap kampung hingga terbentuk aplikasi Nglarisi untuk jamuan makan dan minum. Fase kedua ialah pengembangan kawasan yang terwujud seperti di Bendung Lepen Giwangan dan kini tengah diupayakan di Karangwaru.

"Masterplan kelurahan ini menjadi fase ketiga. Harapannya setiap perencanaan dari masing-masing OPD untuk kegiatan di kelurahan, dapat dijemputi melalui masterplan tersebut. Begitu pula jika ada korporasi maupun kampus yang hendak menggulirkan program pemberdayaan di sana," papar Heroe.

Di samping itu, keberadaan kerangka perencanaan tersebut juga menjembatani kelemahan musrenbang selama ini. Pasalnya, usulan melalui musrenbang kerap bersifat pemerataan anggaran di wilayah. Sehingga ada kelurahan yang membutuhkan penanganan ekstra namun akibat pemerataan anggaran maka hasilnya kurang optimal. Dengan begitu, kelurahan membutuhkan acuan untuk menuntaskan permasalahannya masing-masing secara terintegrasi.

"Meski dukungan anggaran terbatas, tetapi melalui Gandeng Gendong banyak peran yang akan dilibatkan. Ketika korporasi akan masuk melalui program CSR, maka tinggal jalan saja sesuai yang ada di masterplan kelurahan. CSR tidak akan jalan sendiri-sendiri tapi terkoordinasi," tandasnya. (Dhi)-f

PHRI Berharap Ada Celah Jangan Mudik Ayo Piknik

YOGYA (KR) - Kondisi perhotelan dan restoran yang kembali terpuruk karena kebijakan larangan mudik disiasati Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DPD DIY, dengan menggaungkan tagline "Jangan Mudik, Ayo Piknik". Tamu dari luar kota yang bisa masuk ke Yogya diharapkan menginap di hotel, atau menggelar pertemuan dengan keluarga di hotel atau restoran dengan disiplin proses.

"Statemen dari Gubernur DIY atau Sekda, masih memungkinkan celah dari Jawa Tengah masuk DIY, atau sebaliknya, dan kita masih berharap tamu bisa ke hotel atau restoran yang sudah terverifikasi proses Covid-19 dan CHSE, sehingga aman," ungkap Ketua PHRI DPD DIY Deddy Pranowo Eryono kepada KR, Kamis (22/4).

Disebutkan, dalam kondisi saat ini pengusaha hotel dan restoran sangat membutuhkan solusi dan dukungan pemerintah agar tetap bisa bertahan. "Dengan menginap dan menggelar acara di hotel atau restoran yang terverifikasi, justru tamu-tamu dari luar daerah bisa terpantau, dan terawasi dengan baik. Bandingkan jika langsung ke kampung-kampung, akan kesulitan untuk memantau atau mengawasi," ujarnya.

Sementara Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) DIY Bobby Ardyanto SA menyatakan, saat ini industri pariwisata DIY sudah siap dengan kondisi apapun. "Mau ada mudik atau tidak kita siap menggerakkan pariwisata aman, sehat, terkontrol dengan travel corridor anggota Mitra Praja Utama (MPU) dan Jogja Konsorsium," ujarnya.

Bobby menyebutkan bersama Pemda, Dinas Pariwisata, industri wisata juga sudah mengemas berbagai program wisata di masa pandemi Covid-19 yang sukses diujicobakan 6-8 April kemarin.

"Juga beberapa stimulus, relaksasi seperti dari PLN, bank dan lainnya telah diberikan untuk meringankan beban dan mendukung industri wisata di masa pandemi ini," ujarnya. (R-4)-f

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
AKADEMI KOMUNITAS NEGERI SENI DAN BUDAYA YOGYAKARTA
Jalan Parangtritis KM 4,5, Sewon, Bantul, D.I Yogyakarta

**MENERIMA MAHASISWA BARU PROGRAM DIPLOMA SATU (D1)
TA 2021/ 2022**

PROGRAM STUDI

- D1 KARAWITAN
- D1 KRIYA KULIT
- D1 TARI

**BIAYA KULIAH SEPENUHNYA
DITANGGUNG OLEH PEMDA DIY**

WAKTU PENDAFTARAN

- GELOMBANG I :
14 April - 11 Mei 2021

SYARAT PENDAFTARAN

- Mempunyai minat/ bakat di bidang Seni Karawitan, Kriya dan, Tari
- KTP DIY
- SMA/ Sederajat
- Usia tidak dibatasi
- Foto copy kartu identitas
- Pas foto 3x4 background merah (4 lembar dan soft copy)
- Foto copy STTB/ Ijazah/ SKHUN yang dilegalisir

informasi lebih lanjut silahkan kunjungi www.aknyogya.ac.id

Ramadhan Kareem

Ayo BELANJA Murah
Luar Biasa MURAH
Mau Dapat MOBIL
12 April s.d. 31 April 2021

Periode: 21-30 April 2021

MARJAN Rp 15.900	ABC Rp 20.000 Rp 14.800 Rp 12.250 Rp 9.850	ASSORTED BISCUITS Rp 34.150
ROYAL CHOICE Rp 56.050 Rp 49.550 Rp 104.750 Rp 92.750	NISSAN LEMONIA Rp 34.100	GOOD TIME Rp 21.800 Rp 16.500 Rp 47.100 Rp 36.200

HARGA BELUM TERMASUK DISKON | SYARAT DAN KETENTUAN BERLAKU